

DAMPAK KOLONIALISME BELANDA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL - EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA

Ellen Christy Sihotang¹, Muhammad Fahrurrozi², Muhammad Fauzi Damanik³,
Christian Salomo Pardosi⁴, Dra.Flores Tanjung⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

¹christy2@gmail.com, ²mhdrozi285@gmail.com, ³mhdfauzidmk@gmail.com,

⁴pardosichristian067@gmail.com, ⁵flores_tanjung@yahoo.co.id

ABSTRACT

The long period of Dutch colonial rule in Indonesia significantly influenced the formation of the nation's socio-economic structure, creating patterns of dependency and inequality that continued to shape society. This historical reality underlies the importance of examining the impact of Dutch colonialism on the socio-economic life of Indonesian society. The purpose of this study is to analyze how colonial economic and social policies transformed indigenous economic systems and social structures. This research employs a library research approach by reviewing relevant books, scientific journals, and historical documents. The findings indicate that Dutch colonial policies, including trade monopolies, forced labor, agrarian regulations, and export-oriented economic systems, shifted traditional subsistence patterns into a colonial economy serving European market interests. These policies resulted in structural poverty, economic dependency, and sharp social stratification dividing society into Europeans, Foreign Orientals, and indigenous groups. Although colonial modernization introduced infrastructure development, it did not improve indigenous welfare. Instead, prolonged socio-economic pressures fostered collective awareness and resistance movements that later contributed to the emergence of national consciousness. Therefore, Dutch colonialism produced systemic socio-economic transformations while simultaneously shaping the foundation of Indonesia's national awakening.

Keywords: *Dutch colonialism, socio-economic transformation, social stratification, economic exploitation, national awareness.*

ABSTRAK

Lamanya masa kolonialisme Belanda di Indonesia telah memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, serta melahirkan pola ketergantungan dan ketimpangan yang berlangsung dalam jangka panjang. Realitas historis tersebut melatarbelakangi pentingnya kajian mengenai dampak kolonialisme Belanda terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi dan sosial kolonial mengubah sistem ekonomi tradisional serta membentuk struktur sosial yang baru. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dan dokumen sejarah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan monopoli perdagangan, kerja paksa, serta regulasi agraria yang berorientasi ekspor telah menggeser pola ekonomi subsisten menjadi ekonomi kolonial yang melayani kepentingan pasar Eropa. Kebijakan tersebut menimbulkan kemiskinan struktural, ketergantungan ekonomi, serta stratifikasi sosial yang membagi masyarakat ke

dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Meskipun pembangunan infrastruktur diperkenalkan, kesejahteraan masyarakat pribumi tidak meningkat secara signifikan. Sebaliknya, tekanan sosial-ekonomi justru melahirkan kesadaran kolektif dan perlawanan yang menjadi dasar tumbuhnya kesadaran nasional.

Kata Kunci: Kolonialisme Belanda, transformasi sosial-ekonomi, stratifikasi sosial, eksploitasi ekonomi, kesadaran nasional.

A. Pendahuluan

Sejarah Indoensia merupakan rangkaian proses panjang yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman kolonialisme, terutama di bawah kekuasaan pemerintahan Hindu Belanda yang berlangsung kurang lebih tiga setengah abad. Periode penjajahan itu menjadi momen penting yang menentukan jalur pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia.

Kolonialisme adalah tindakan penguasaan sebuah negara atas wilayah lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial, memperluas kekuasaan politik, dan mengendalikan sumber daya alam. Kedatangan bangsa Belanda melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yaitu pada tahun 1602 menandai awal dominasi kolonial di Nusantara. Awalnya VOC berfungsi sebagai Kongsi dagang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun dalam perkembangannya, VOC memiliki

kewenangan layaknya negara, termasuk membentuk angkatan perang, membuat perjanjian, dan memungut pajak.

Kolonialisme Belanda mengalami perkembangan melalui proses yang lama dan terorganisir. Sejak periode penguasaan bisnis hingga penciptaan sistem administrasi kolonial yang terpusat, wilayah Indonesia juga diikutsertakan ke dalam jaringan ekonomi global yang berfokus pada kepentingan negara asalnya yaitu Belanda. Dalam kebijakan ekonomi kolonial disusun untuk memastikan bahwa daerah jajahan berfungsi sebagai tempat penghasil komoditas ekspor dan juga sebagai pasar untuk barang-barang Eropa. Dalam situasi tersebut, penerapan sistem tanam paksa pada abad ke-19 menjadi salah satu momen penting yang dimana menandai peningkatan eksploitasi sumber daya pertanian dan tenaga kerja lokal. Yang dimana sistem ini mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman tertentu

seperti kopi, tebu, dan nila untuk tujuan ekspor, yang hasilnya memberikan keuntungan besar bagi pemerintah penjajah.

Kebijakan ini langsung membawa dampak pada perubahan struktur ekonomi masyarakat. Pola produksi yang awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lokal perlahan-lahan beralih menjadi produksi komersial yang berfokus pada pasar internasional. Dimana dari perubahan ini menyebabkan ketergantungan yang baru terhadap perubahan harga komoditas dan menyempitkan ruang ekonomi masyarakat. Selain itu juga, sistem monopoli dalam perdagangan dan penguasaan tanah oleh pihak swasta menguatkan dominasi modal kolonial atas sektor-sektor penting dalam perekonomian. Masyarakat lokal semakin terpinggirkan dalam struktur ekonomi yang dikuasai oleh Eropa dan perantara dari Timur.

Transformasi ekonomi tersebut berjalan seiring dengan rekayasa sosial yang dilembagakan melalui kebijakan kolonial. Pemerintah kolonial membentuk stratifikasi sosial yang tegas dengan membagi penduduk ke dalam kategori Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Klasifikasi ini tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hukum, dan fasilitas publik. Akibatnya, struktur masyarakat yang sebelumnya lebih berbasis pada ikatan adat dan komunal mengalami perubahan menjadi lebih hierarkis dan diskriminatif. Ketimpangan sosial pun semakin menguat, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi.

Memasuki awal abad ke-20, kebijakan Kapitalisme Kolonial yang ditandai dengan pembukaan investasi swasta dan ekspansi perkebunan besar memang menghadirkan modernisasi infrastruktur seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan fasilitas industri. Namun, modernisasi tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Sebaliknya, banyak rakyat mengalami tekanan ekonomi akibat rendahnya upah, beban pajak yang tinggi, serta praktik kerja paksa yang masih berlangsung dalam berbagai bentuk. Krisis pangan dan kemiskinan struktural menjadi fenomena yang sering terjadi di berbagai daerah. Meskipun istilah *wingewest* secara formal dihapuskan, orientasi ekonomi politik kolonial tetap menempatkan tanah jajahan sebagai sumber

keuntungan bagi negara induk dan para pemodal.

Eksplorasi yang berkelanjutan tersebut memunculkan berbagai bentuk resistensi sosial. Ketimpangan ekonomi dan diskriminasi sosial mendorong lahirnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat pribumi. Solidaritas sosial tumbuh sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang semakin berat. Dalam beberapa kasus, ketegangan sosial juga muncul dalam bentuk sentimen terhadap kelompok perantara ekonomi, terutama etnis Tionghoa, yang dianggap memperoleh posisi strategis dalam sistem perdagangan kolonial. Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan kolonial semakin sering disuarakan dalam forum-forum organisasi dan kongres rakyat yang membahas persoalan kerja paksa, upah rendah, pajak tanah, tanah partikelir, serta dominasi industri perkebunan. Fakta historis seperti pemogokan pegawai pegadaian pada tahun 1922 dan pemogokan buruh kereta api pada tahun 1923 menunjukkan bahwa tekanan sosial-ekonomi telah berkembang menjadi gerakan kolektif yang lebih terorganisasi.

Pada akhirnya, dinamika sosial dan ekonomi pada masa kolonial memperlihatkan bahwa eksploitasi yang sistematis tidak hanya menghasilkan kemiskinan dan ketimpangan, tetapi juga membentuk kesadaran historis masyarakat tentang pentingnya kemandirian dan keadilan sosial.

Berdasarkan realitas historis tersebut, kajian mengenai dampak kolonialisme Belanda terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi relevan untuk diangkat sebagai fokus penelitian. Pemilihan judul ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memahami secara kritis akar struktural ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia, sekaligus menelaah bagaimana tekanan kolonial justru melahirkan solidaritas dan kesadaran kolektif yang menjadi fondasi pergerakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kolonialisme, perubahan sosial, dan pembentukan identitas serta perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research) sebagai metode utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelusuran, pengkajian, serta analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Mestika Zed (2003), studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan pustaka, yang meliputi aktivitas membaca, mencatat, serta mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Dalam konteks ini, data yang digunakan tidak diperoleh melalui observasi lapangan secara langsung, melainkan melalui telaah sistematis terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sarwono (2006) menjelaskan bahwa studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat,

memperjelas kerangka berpikir, serta memperkaya pemahaman konseptual peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian tidak berdiri tanpa dasar, melainkan bertumpu pada teori dan temuan ilmiah yang telah teruji sebelumnya.

Sementara itu, Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis yang bersumber dari referensi dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan budaya, nilai, norma, serta berbagai aspek sosial yang berkembang dalam situasi yang diteliti. Melalui kajian ini, peneliti dapat memahami konteks sosial secara lebih mendalam dan komprehensif.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber literatur yang relevan; (2) klasifikasi dan seleksi bahan pustaka berdasarkan tingkat kredibilitas dan keterkaitannya dengan topik penelitian; (3) pembacaan kritis dan pencatatan data penting; serta (4) analisis dan sintesis informasi guna membangun kerangka konseptual yang sistematis. Dengan

menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, terstruktur, serta memiliki dasar teoritis yang kuat sesuai dengan kaidah ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedatangan dan dominasi kekuatan kolonial Belanda di Nusantara bermula dari aktivitas perdagangan yang kemudian berkembang menjadi bentuk kolonialisme yang terstruktur. Kemudian pembentukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yaitu pada tahun 1602 menjadi titik awal konsolidasi kekuatan dagang Belanda di kawasan Asia. Melalui pemberian hak oktroi oleh Staten-Generaal, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan, hak mencetak mata uang, membangun benteng, memiliki angkatan bersenjata, hingga membuat perjanjian dan berperang atas nama negara. Kekuasaan yang hampir menyerupai negara berdaulat ini memungkinkan VOC tidak hanya mengendalikan jalur perdagangan, tetapi juga melakukan intervensi politik terhadap kerajaan-kerajaan lokal. Seiring waktu, dominasi dagang tersebut bertransformasi menjadi

penguasaan administratif di bawah Pemerintah Hindia Belanda, yang semakin memperkuat kontrol kolonial atas kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

berubah menjadi ekonomi kolonial yang berorientasi ekspor dan kepentingan pasar Eropa. Ketergantungan ini menempatkan masyarakat pribumi sebagai tenaga kerja murah dalam sistem kapitalisme kolonial, sementara keuntungan ekonomi terakumulasi di tangan pemerintah kolonial dan pemodal asing. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam antara kelompok Eropa dan pribumi, serta melemahnya kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia.

Dampak kolonialisme Belanda dalam bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling mendasar dalam membentuk struktur perekonomian Indonesia pada masa kolonial. Sejak awal kedatangannya, Belanda melalui VOC menerapkan sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan perdagangan dan akumulasi modal bagi negara induk. Monopoli perdagangan rempah-rempah, penguasaan jalur pelayaran, serta eksploitasi sumber daya alam menjadi fondasi utama kebijakan

ekonomi kolonial. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme pemaksaan, seperti kerja paksa, kontrak tanam, serta penetapan harga yang merugikan produsen lokal. Sinaga dkk. (2023) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi VOC di Nusantara berorientasi pada monopoli perdagangan dan pengendalian produksi melalui kerja paksa serta kontrak politik-ekonomi dengan penguasa lokal, sehingga berdampak langsung terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Akibatnya, masyarakat pribumi kehilangan kemandirian ekonomi dan bergantung sepenuhnya pada sistem yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial.

Eksplorasi ekonomi tersebut semakin menguat pada masa pemerintahan Hindia Belanda setelah VOC dibubarkan. Kebijakan agraria kolonial, khususnya setelah diberlakukannya

Undang-Undang Agraria 1870, membuka peluang bagi modal swasta Eropa untuk menguasai lahan-lahan produktif di Indonesia. Tanah yang sebelumnya dikelola secara komunal oleh masyarakat adat beralih menjadi milik perkebunan besar, sehingga

petani kehilangan akses terhadap sumber penghidupan utama mereka. Zulyanti dkk. (2022) menjelaskan bahwa kebijakan agraria kolonial menyebabkan petani terjebak dalam sistem upah rendah, kehilangan hak atas tanah, serta mengalami proses proletarianisasi yang memperlemah posisi ekonomi masyarakat desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi kolonial tidak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat pribumi, melainkan semata-mata untuk menjamin keuntungan bagi pemerintah kolonial dan pemodal asing. Dampak ekonomi tersebut berkelindan erat dengan perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem stratifikasi sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang kaku, yakni golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Pembagian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hukum, dan sumber daya ekonomi. Golongan Eropa menempati posisi tertinggi dengan hak istimewa yang luas, sementara masyarakat pribumi berada pada lapisan terbawah dan

mengalami berbagai bentuk diskriminasi sosial.

Aditya dkk. (2023) menyatakan bahwa kolonialisme Belanda membentuk sistem stratifikasi sosial yang memperkuat ketimpangan ekonomi dan menciptakan ketergantungan struktural masyarakat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial. Struktur sosial semacam ini mempersempit mobilitas sosial masyarakat pribumi dan memperkuat dominasi kolonial dalam jangka panjang.

Ketimpangan sosial yang semakin tajam turut memicu munculnya berbagai bentuk perlawanan dan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat.

Tekanan ekonomi berupa upah rendah, pajak yang memberatkan, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi mendorong lahirnya solidaritas sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat tertindas. Pemogokan buruh, kritik dalam kongres-kongres rakyat, serta berkembangnya organisasi pergerakan nasional menjadi bukti bahwa penderitaan sosial-ekonomi telah melahirkan kesadaran akan pentingnya perubahan sistem. Dalam konteks ini, perjuangan melawan kolonialisme tidak hanya dimaknai

sebagai perlawanan politik, tetapi juga sebagai upaya merebut kembali hak-hak ekonomi dan martabat sosial yang dirampas oleh sistem kolonial.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda membawa dampak yang sistemik dan mendalam terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Kebijakan ekonomi kolonial menciptakan ketergantungan struktural dan kemiskinan, sementara sistem sosial kolonial melanggengkan ketimpangan dan diskriminasi

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda memiliki pengaruh yang terencana, terstruktur, dan berkepanjangan terhadap aspek sosial serta perekonomian masyarakat Indonesia. Sejak era VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, kebijakan kolonial ditujukan untuk menghubungkan wilayah Nusantara dalam jaringan perekonomian global yang berfokus pada kepentingan negara kolonial. Melalui praktik monopoli dalam perdagangan, kerja paksa, sistem tanam paksa, dan

penerapan kebijakan agraria seperti Undang-Undang Agraria 1870, rakyat pribumi berperan sebagai tenaga kerja murah dan produsen komoditas untuk diekspor, sementara keuntungan ekonomi terakumulasi di tangan pemerintah kolonial serta investor asing. Hal ini menyebabkan hilangnya kemandirian ekonomi daerah dan memperkuat ketergantungan struktural terhadap sistem kolonial yang ada.

Dalam aspek sosial, penerapan stratifikasi yang memisahkan masyarakat dalam kategori Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan jelas menegaskan batas-batas dalam hierarki sosial serta memperkuat diskriminasi dalam hal akses pendidikan, hukum, lapangan kerja, dan layanan publik. Struktur sosial yang tidak fleksibel itu membatasi mobilitas sosial masyarakat pribumi dan memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Modernisasi infrastruktur yang mulai dilaksanakan di awal abad ke-20 memang menunjukkan adanya kemajuan material, tetapi tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan karena tetap mengutamakan kepentingan kolonial.

Namun, tekanan dan ketidakadilan yang terus-menerus berlangsung justru menumbuhkan kesadaran kolektif di antara masyarakat pribumi. Ketidakadilan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, serta diskriminasi sosial berkontribusi pada terbentuknya solidaritas, perlawanan, serta organisasi gerakan yang mengupayakan keadilan dan kemandirian. Oleh karena itu, kolonialisme Belanda tidak hanya meninggalkan warisan ketidaksetaraan struktural, tetapi juga menjadi elemen kunci dalam membentuk kesadaran nasional dan dasar perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bosma, U., & Raben, R. (2022). *Ras, kuasa, dan kekerasan kolonial di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan kolonial dari kerja paksa: Sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720–1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Stroomberg, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Wardana, W. Y. (2025). *Sejarah lengkap VOC: Ambisi dan eksploitasi politik kolonial korporasi*

pertama di dunia. Yogyakarta: IRCiSoD.

Jurnal:

Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial dan ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24402–24407.

Musliati, M., Aulia, C., & Erwinsyah, E. (2023). Perkembangan sosial masyarakat pada masa penjajahan. *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(2), 104–116.

Naibaho, A. K., Sari, C., Manurung, K. D. M., Simanjuntak, O. S., Siregar, M. S., & Nasution, I. M. (2025). Dampak kolonialisme bangsa Barat terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di Asia Tenggara. *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18207–18214.

Sinaga, R., Putri, S. E., Siagian, Y. M., Silvia, N., & Zikri, M. F. (2025). Kebijakan ekonomi VOC dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 303–310.

Sinaga, R., Simanjuntak, J. V., Tondang, O. P., & Larasati, S. (2024). Masa pemerintahan VOC di Nusantara: Awal kedatangan hingga penyebab bubarnya VOC. *AR Rumman: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 389–396.

Sobih, M. (2025). Analisis dampak imperialisme dan kolonialisme Belanda terhadap struktur sosial

dan ekonomi Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 861–869.

Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (Perspektif perubahan dan kesinambungan). *Diakronika*, 17(1), 90–103.

Zulyanti, M., Zuriatin, Z., Syahbudin, S., & Hidayat, A. G. (2025). Dampak kebijakan agraria pemerintah kolonial Belanda terhadap kondisi sosial ekonomi petani di Pulau Jawa, 1870–1940. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 9(2), 336–349.